



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 8525-8534

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Inflasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pendapatan Nasional serta Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi di Indonesia

Nabilah Fadiah Hapshoh¹, Hendra Riofita²

¹²Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹nabilafadiah123@gmail.com, ²hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap kinerja pendapatan nasional serta mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan tinjauan pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku teks ekonomi, laporan resmi Bank Indonesia, publikasi Badan Pusat Statistik, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap seluruh komponen utama pendapatan nasional, meliputi konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, serta neraca ekspor dan impor. Inflasi yang tinggi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, menurunnya minat investasi akibat ketidakpastian ekonomi, serta melemahnya daya saing produk ekspor di pasar internasional. Sebaliknya, inflasi yang rendah dan stabil terbukti mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan nasional. Upaya pengendalian inflasi dilakukan secara terkoordinasi melalui kebijakan moneter oleh Bank Indonesia menggunakan instrumen suku bunga dan operasi pasar terbuka, serta kebijakan fiskal oleh pemerintah yang mencakup subsidi, operasi pasar komoditas, dan penguatan sistem distribusi barang. Koordinasi antara kedua otoritas kebijakan tersebut menjadi kunci efektivitas pengendalian inflasi. Kesimpulannya, stabilitas inflasi merupakan prasyarat utama dalam menjaga kinerja pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Inflasi, Pendapatan Nasional, Stabilitas Ekonomi, Kebijakan Moneter, Pertumbuhan Ekonomi

1. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling berkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dalam perjalanannya, perekonomian tidak selalu berjalan mulus karena senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat mengguncang kestabilannya. Salah satu permasalahan ekonomi yang paling sering terjadi dan paling berdampak luas adalah inflasi. Inflasi bukan sekadar fenomena kenaikan harga biasa, melainkan merupakan suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum, terus-menerus, dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi ini menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang begitu luas dan merata terhadap seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Ketika harga-harga naik secara bersamaan, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang sama dengan uang yang dimiliki menjadi semakin berkurang, dan hal ini pada akhirnya dapat mengganggu jalannya aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Mankiw, 2021).

Di Indonesia, inflasi telah lama menjadi salah satu indikator makroekonomi yang paling diperhatikan dan dipantau secara ketat oleh pemerintah maupun Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan struktur ekonomi yang masih rentan terhadap berbagai guncangan harga, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bank Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan berupaya menjaga inflasi pada kisaran target yang telah ditetapkan agar perekonomian dapat berjalan dengan stabil dan terkendali. Berdasarkan data yang dirilis oleh (Badan Pusat Statistik, 2023), inflasi Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lonjakan inflasi yang paling mencolok terjadi pada tahun 2022, yang dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM)

bersubsidi. Kebijakan tersebut berdampak domino terhadap kenaikan harga barang dan jasa di hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari transportasi, pangan, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan dengan sangat jelas betapa rentannya struktur perekonomian domestik terhadap tekanan inflasi, khususnya yang berasal dari sektor energi sebagai komponen biaya produksi yang sangat fundamental (Badan Pusat Statistik, 2023).

Inflasi yang tidak terkendali terbukti memiliki dampak negatif yang nyata dan terukur terhadap kinerja pendapatan nasional suatu negara. Pendapatan nasional merupakan cerminan utama dari kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, yang secara konvensional diukur melalui besaran Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, dalam kondisi inflasi yang tinggi, terdapat suatu fenomena yang perlu dipahami secara mendalam, yaitu kenaikan nilai PDB nominal yang tidak selalu merepresentasikan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena nilai PDB nominal yang meningkat tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga barang dan jasa, bukan oleh peningkatan volume produksi secara riil. Oleh karena itu, para ekonom dan pengambil kebijakan lebih mengandalkan PDB riil sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, karena PDB riil dihitung menggunakan harga konstan sehingga pengaruh inflasi dapat dieliminasi dan pertumbuhan produksi dapat terlihat secara lebih akurat dan objektif (Blanchard, 2021).

Lebih jauh lagi, inflasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap setiap komponen utama pembentuk pendapatan nasional yang saling berhubungan satu sama lain. Dari sisi konsumsi rumah tangga, kenaikan harga yang terjadi akibat inflasi memaksa masyarakat untuk lebih selektif dan berhemat dalam pengeluaran mereka, terutama dengan mengurangi pembelian barang-barang yang dianggap kurang esensial dan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok. Dari sisi investasi, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kondisi inflasi yang tidak stabil membuat para pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dan cenderung menunda rencana ekspansi bisnis maupun pembukaan usaha baru. Dari sisi perdagangan internasional, inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara mitra dagang menyebabkan produk-produk ekspor Indonesia menjadi kurang bersaing di pasar global karena harganya relatif lebih mahal, sementara di sisi lain produk impor justru menjadi semakin menarik bagi konsumen dalam negeri karena harganya yang relatif lebih murah (World Bank, 2022).

Menghadapi kompleksitas dampak inflasi yang multidimensional tersebut, diperlukan suatu pendekatan kebijakan yang komprehensif, terkoordinasi, dan berkesinambungan antara kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah. Kedua instrumen kebijakan ini tidak dapat bekerja secara sendiri-sendiri karena keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dan saling mendukung dalam upaya pengendalian inflasi. Koordinasi yang erat dan harmonis antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi kunci utama dalam mengelola ekspektasi inflasi masyarakat sekaligus memastikan bahwa inflasi dapat dijaga pada tingkat yang kondusif bagi terciptanya iklim investasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan (Riofita, 2023).

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, terlihat dengan jelas bahwa kajian mendalam mengenai analisis inflasi dan pengaruhnya terhadap kinerja pendapatan nasional serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjadi sangat penting, relevan, dan mendesak untuk dilakukan. Urgensi kajian ini semakin menguat dalam konteks tantangan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 yang meninggalkan berbagai luka struktural dalam perekonomian, sekaligus dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang semakin tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian. Dengan memahami secara komprehensif mekanisme transmisi inflasi terhadap berbagai aspek perekonomian, diharapkan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena inflasi dan pengaruhnya terhadap kinerja pendapatan nasional serta stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui studi literatur, peneliti mengkaji berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan inflasi, pendapatan nasional, dan kebijakan ekonomi makro sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku ekonomi, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, serta publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, memahami, dan mencatat informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema tertentu agar memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang relevan dipilih dan disusun secara sistematis untuk melihat hubungan antara inflasi, pendapatan nasional, dan stabilitas ekonomi. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak inflasi terhadap pendapatan nasional serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

a. Inflasi dan Keterkaitannya dengan Pendapatan Nasional

Inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi yang paling sering terjadi dan paling banyak dibicarakan dalam wacana kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Secara definitif, inflasi dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang bersifat terus-menerus dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dalam konteks inflasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari sekadar kenaikan harga sesaat atau kenaikan harga pada komoditas tertentu saja, karena inflasi mencakup kenaikan harga yang bersifat menyeluruh dan memengaruhi hampir semua sektor perekonomian secara bersamaan. Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya terbatas pada perubahan nilai nominal uang, tetapi jauh lebih dalam memengaruhi kemampuan riil masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Ketika inflasi terjadi secara berkepanjangan dan dibiarkan tanpa pengendalian yang memadai, maka kondisi tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekonomi secara fundamental dan menghambat tercapainya tujuan-tujuan pembangunan nasional (Riofita, 2022).

Dalam praktik perekonomian sehari-hari, inflasi pada umumnya muncul dan berkembang akibat adanya ketidakseimbangan yang mendasar antara sisi permintaan dan sisi penawaran dalam perekonomian. Ketika masyarakat memiliki kemampuan dan keinginan untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang besar, sementara di sisi lain kapasitas produksi dan ketersediaan barang tidak mampu mengimbangnya, maka mekanisme pasar akan merespons ketidakseimbangan tersebut melalui kenaikan harga. Selain dari sisi permintaan, tekanan inflasi juga dapat bersumber dari sisi biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku, peningkatan upah tenaga kerja, lonjakan harga energi, serta meningkatnya biaya distribusi dan logistik secara langsung akan mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produk mereka agar margin keuntungan tetap terjaga. Dengan demikian, inflasi merupakan fenomena yang dapat bersumber dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi permintaan yang disebut demand-pull inflation dan dari sisi biaya yang dikenal sebagai cost-push inflation, dan keduanya memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda (Mankiw, 2021).

Keterkaitan antara inflasi dan pendapatan nasional merupakan salah satu hubungan paling fundamental dalam ilmu ekonomi makro yang telah banyak dikaji oleh para ekonom di seluruh dunia. Pendapatan nasional yang direpresentasikan melalui Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dihitung dengan dua pendekatan yang berbeda, yaitu PDB nominal dan PDB riil, dan perbedaan di antara keduanya sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi. PDB nominal dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan, sehingga ketika inflasi tinggi dan harga-harga naik, nilai PDB nominal akan otomatis meningkat meskipun volume produksi barang dan jasa secara fisik tidak bertambah sama sekali. Sebaliknya, PDB riil menggunakan harga-harga yang telah ditetapkan pada periode tertentu sebagai tahun dasar, sehingga perubahan nilainya benar-benar mencerminkan perubahan dalam jumlah produksi dan bukan sekadar perubahan harga. Oleh karena itu, PDB riil jauh lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, karena ia telah berhasil memisahkan pengaruh inflasi dari pengaruh pertumbuhan produksi yang riil (Blanchard, 2021).

Peningkatan PDB nominal yang dramatis di tengah kondisi inflasi yang tinggi sering kali menimbulkan ilusi pertumbuhan yang dapat menyesatkan analisis dan pengambilan kebijakan. Situasi ini pernah terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia pada masa-masa inflasi tinggi di era sebelum reformasi. Ketika angka PDB nominal menunjukkan pertumbuhan yang impresif namun PDB riil justru stagnan atau bahkan menurun, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanyalah semu dan tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Pemahaman mendalam tentang hubungan antara inflasi dan kedua varian PDB ini menjadi sangat penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas agar tidak terjebak dalam interpretasi yang keliru mengenai kondisi perekonomian yang sebenarnya sedang terjadi (Bank Indonesia, 2022).

b. Pengaruh Inflasi terhadap Komponen Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dari sisi pengeluaran terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, serta ekspor neto

yang merupakan selisih antara ekspor dan impor. Keempat komponen ini secara bersama-sama membentuk total permintaan agregat dalam perekonomian, dan masing-masing dari komponen tersebut memiliki kerentanan yang berbeda-beda terhadap perubahan tingkat inflasi. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana inflasi memengaruhi setiap komponen ini menjadi sangat krusial dalam merancang respons kebijakan yang tepat dan efektif.

a. Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan secara konsisten menjadi komponen terbesar dalam struktur PDB nasional, dengan kontribusi yang secara historis selalu berada di atas 50% dari total PDB. Dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur ekonomi ini menjadikan perubahan pada perilaku konsumsi masyarakat memiliki dampak yang sangat besar dan langsung terasa pada keseluruhan kinerja perekonomian nasional. Ketika inflasi terjadi dan harga-harga barang kebutuhan pokok seperti bahan pangan, energi, dan transportasi mengalami kenaikan, masyarakat pada umumnya akan menghadapi tekanan yang sangat nyata pada anggaran rumah tangga mereka. Mereka terpaksa mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar dan tidak dapat ditunda, sehingga secara otomatis ruang yang tersedia untuk pengeluaran pada kebutuhan sekunder dan tersier menjadi semakin sempit dan terbatas (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dampak penurunan konsumsi ini sangat dirasakan oleh berbagai sektor industri yang memproduksi barang-barang non-esensial, seperti industri hiburan, pariwisata, barang elektronik, fashion, dan berbagai jenis jasa yang dianggap kurang mendesak. Penurunan permintaan pada sektor-sektor ini tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalamnya, tetapi juga berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja yang pada akhirnya akan semakin menekan daya beli masyarakat dan menciptakan spiral penurunan ekonomi yang sulit dihentikan. Fakta empiris yang sangat jelas dapat dilihat dari peristiwa kenaikan harga BBM bersubsidi pada September 2022, yang dalam waktu singkat menyebabkan inflasi nasional melonjak hingga mencapai angka 5,51%, jauh melampaui target Bank Indonesia. Lonjakan inflasi tersebut langsung tercermin pada penurunan indeks kepercayaan konsumen dan perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal-kuartal berikutnya, membuktikan betapa kuatnya kanal transmisi antara inflasi dan perilaku konsumsi masyarakat Indonesia.

b. Investasi

Investasi merupakan komponen pendapatan nasional yang berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, karena melalui investasilah kapasitas produksi ekonomi diperluas, teknologi diperbarui, lapangan kerja baru diciptakan, dan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi masa depan dibangun. Namun, investasi juga merupakan komponen yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi, termasuk inflasi. Ketika inflasi meningkat dan menciptakan iklim ketidakpastian dalam perekonomian, para investor dan pelaku usaha menjadi semakin berhati-hati dan selektif dalam mengambil keputusan investasi mereka. Ketidakpastian mengenai arah pergerakan harga di masa depan membuat kalkulasi biaya dan manfaat dari setiap proyek investasi menjadi jauh lebih sulit dan berisiko, sehingga banyak rencana investasi yang akhirnya ditunda atau bahkan dibatalkan sama sekali (Todaro & Smith, 2020).

Di samping faktor ketidakpastian harga, dampak inflasi terhadap investasi juga bekerja melalui saluran suku bunga. Dalam upayanya untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia akan merespons dengan menaikkan suku bunga acuan BI Rate, yang kemudian ditransmisikan melalui sistem perbankan dalam bentuk kenaikan suku bunga kredit. Kenaikan suku bunga kredit ini secara langsung meningkatkan biaya modal bagi para pelaku usaha yang membutuhkan pendanaan eksternal untuk membiayai investasi mereka. Dengan biaya pinjaman yang lebih mahal, proyek-proyek investasi yang sebelumnya dianggap layak secara ekonomis bisa menjadi tidak lagi menguntungkan, sehingga pelaku usaha terpaksa memilih untuk mengurangi skala investasi atau menundanya hingga kondisi suku bunga kembali lebih kondusif. Penurunan investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang akan menggerus kapasitas produksi nasional, membatasi penciptaan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya melemahkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara struktural (International Monetary Fund, 2022).

c. Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah memiliki posisi dan peran yang sangat strategis sebagai penyangga dan stabilisator ekonomi ketika inflasi meningkat dan mengancam daya beli masyarakat. Melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal yang dimilikinya, pemerintah dapat melakukan intervensi langsung untuk meringankan beban masyarakat yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Bentuk-bentuk intervensi tersebut dapat berupa pemberian subsidi pada komoditas-komoditas strategis seperti bahan bakar, listrik, dan bahan pangan pokok, penyelenggaraan operasi pasar untuk menstabilkan harga di tingkat konsumen, penyaluran bantuan sosial tunai kepada kelompok

masyarakat paling rentan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meskipun di tengah tekanan inflasi yang tinggi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Namun demikian, penggunaan instrumen fiskal untuk mengatasi inflasi ini mengandung dilema kebijakan yang tidak sederhana. Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial yang besar-besaran di satu sisi memang dapat membantu meringankan dampak inflasi bagi masyarakat dalam jangka pendek, namun di sisi lain dapat menimbulkan tekanan baru terhadap keseimbangan fiskal negara. Jika defisit anggaran yang diakibatkan oleh ekspansi pengeluaran tersebut dibiayai melalui pencetakan uang baru, maka justru akan menambah jumlah uang yang beredar dan berpotensi memperparah tekanan inflasi itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen pengeluaran pemerintah yang prudent, disiplin, dan berorientasi jangka panjang menjadi sangat krusial agar kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai solusi bagi masalah inflasi, bukan malah menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

d. Ekspor dan Impor

Inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi di negara-negara mitra dagang utama Indonesia akan secara sistematis mengurangi daya saing produk-produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Ketika harga-harga barang yang diproduksi di dalam negeri meningkat akibat inflasi, harga ekspor produk-produk tersebut dalam mata uang asing pun akan ikut meningkat, sehingga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif dibandingkan produk sejenis yang ditawarkan oleh negara-negara pesaing. Para pembeli dan importir di luar negeri yang sensitif terhadap harga akan cenderung mengalihkan pembelian mereka kepada pemasok dari negara lain yang menawarkan harga lebih rendah, sehingga volume ekspor Indonesia berpotensi mengalami penurunan yang signifikan (World Bank, 2022).

Pada saat yang bersamaan, inflasi domestik yang tinggi juga menciptakan insentif bagi konsumen dan industri dalam negeri untuk beralih dari produk lokal ke produk impor yang harganya relatif lebih terjangkau. Peningkatan volume impor yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekspor akan memperburuk posisi neraca perdagangan Indonesia dan memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah pada gilirannya akan meningkatkan harga barang-barang impor dalam mata uang rupiah, sehingga menciptakan apa yang dikenal sebagai *imported inflation* atau inflasi yang diimpor dari luar negeri. Mekanisme umpan balik negatif ini dapat memperparah tekanan inflasi yang sudah ada dan menciptakan lingkaran setan yang sangat sulit diputus tanpa adanya intervensi kebijakan yang tepat, terkoordinasi, dan dilaksanakan dengan penuh konsistensi

c. Pengaruh Inflasi terhadap Kinerja Pendapatan Nasional di Indonesia

Dalam konteks spesifik perekonomian Indonesia, pengaruh inflasi terhadap kinerja pendapatan nasional dapat dianalisis dan dipahami melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan erat. Data historis yang dikompilasi oleh BPS menunjukkan bahwa pola fluktuasi inflasi di Indonesia dalam periode 2021 hingga 2023 memiliki korelasi yang sangat jelas dan konsisten dengan pola pergerakan pertumbuhan PDB riil. Pada saat inflasi berada pada level yang rendah selama periode pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021, hal tersebut lebih banyak mencerminkan kontraksi permintaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi daripada kondisi stabilitas harga yang sebenarnya sehat. Kemudian ketika inflasi melonjak tajam pada tahun 2022 akibat kenaikan harga BBM dan dampak dari konflik geopolitik internasional yang memengaruhi harga komoditas global, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDB riil mengalami perlambatan yang cukup terasa, mencerminkan erosi daya beli masyarakat yang terjadi secara luas (Badan Pusat Statistik, 2023).

Dalam perspektif struktural yang lebih panjang, inflasi yang terjadi secara berkepanjangan dan tidak tertangani dengan baik memiliki potensi untuk menggerus akumulasi modal fisik dan manusia yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketika nilai riil tabungan masyarakat tergerus oleh inflasi, kemampuan untuk membiayai investasi produktif dari sumber domestik menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, ketika ketidakpastian akibat inflasi membuat investor asing dan domestik enggan menanamkan modal jangka panjang di Indonesia, proses akumulasi kapital yang dibutuhkan untuk mendorong transformasi struktural perekonomian menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi akan terhambat secara serius. Kondisi ini sangat krusial untuk diatasi mengingat Indonesia tengah berupaya keras mewujudkan visi ambisius menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2045, sebuah target yang mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, berkelanjutan, dan bebas dari jebakan inflasi kronis (Riofita, 2024).

d. Dampak Inflasi terhadap Stabilitas Ekonomi

Dampak inflasi terhadap stabilitas ekonomi bersifat multidimensional dan dapat dirasakan oleh seluruh pelaku ekonomi, meskipun dengan intensitas dan karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada posisi dan

kondisi masing-masing. Dalam perspektif akademis dan kebijakan, inflasi yang berada pada kisaran yang rendah dan terkendali, umumnya antara 2 hingga 4 persen per tahun, secara umum dianggap sebagai kondisi yang tidak hanya dapat diterima tetapi bahkan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Inflasi moderat pada kisaran tersebut memberikan sinyal positif kepada para produsen bahwa harga produk mereka akan terus meningkat secara gradual, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan volume produksi dan mempertimbangkan ekspansi kapasitas. Selain itu, inflasi moderat juga memberikan ruang gerak yang diperlukan bagi kebijakan moneter untuk merespons potensi perlambatan ekonomi melalui penurunan suku bunga (Blanchard, 2021).

Namun, ketika inflasi melampaui ambang batas yang dianggap kondusif tersebut dan terus meningkat ke level yang tinggi, dampak negatifnya mulai mendominasi dan mengalahkan dampak positif yang mungkin ada. Dampak yang paling langsung dan paling terasa oleh masyarakat luas adalah merosotnya daya beli, yang berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya dapat membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dari sebelumnya. Bagi kelompok masyarakat yang hidup dari pendapatan tetap seperti pegawai negeri, pensiunan, dan pekerja dengan upah minimum, erosi daya beli ini sangat menyiksa karena pendapatan nominal mereka tidak otomatis menyesuaikan diri dengan laju inflasi. Inflasi juga memiliki efek redistribusi pendapatan yang sangat tidak adil, di mana pemilik aset riil seperti properti, saham, dan komoditas cenderung diuntungkan karena nilai aset mereka ikut naik seiring inflasi, sementara mereka yang hanya memiliki tabungan dalam bentuk uang tunai atau deposito dengan suku bunga di bawah inflasi justru mengalami kerugian riil yang nyata (Riofita, 2022).

Ketidakstabilan harga yang ditimbulkan oleh inflasi yang tinggi dan tidak menentu juga berdampak sangat serius terhadap iklim dunia usaha dan investasi. Ketika para pelaku usaha tidak dapat memprediksi dengan memadai bagaimana arah pergerakan harga bahan baku, upah, dan harga jual produk mereka di masa depan, kemampuan mereka untuk membuat perencanaan bisnis yang solid dan pengambilan keputusan investasi yang rasional menjadi sangat terganggu. Ketidakpastian ini mendorong pelaku usaha untuk bersikap sangat konservatif, menghindari komitmen jangka panjang, dan lebih memilih untuk mengakumulasi keuntungan jangka pendek daripada berinvestasi dalam proyek-proyek produktif jangka panjang yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada level makro, kondisi ini secara kumulatif akan melemahkan daya saing perekonomian nasional dan menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan (Salim et al., 2021).

e. Upaya Menjaga Stabilitas Ekonomi

Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia mengemban tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satu manifestasinya adalah menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai pendekatan utama dalam pengelolaan kebijakan moneter. Di bawah kerangka ITF ini, Bank Indonesia secara transparan mengumumkan target inflasi kepada publik dan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter secara terkoordinasi untuk mencapai target tersebut. Instrumen utama yang digunakan mencakup penetapan dan penyesuaian suku bunga acuan BI Rate, pelaksanaan operasi pasar terbuka untuk mengatur likuiditas perbankan, pengelolaan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, serta kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Bank Indonesia, 2023).

Di sisi fiskal, pemerintah memiliki serangkaian instrumen yang dapat digunakan secara fleksibel dan responsif untuk mengatasi tekanan inflasi dan melindungi daya beli masyarakat. Dalam jangka pendek, kebijakan subsidi pada komoditas-komoditas strategis, penyelenggaraan operasi pasar untuk komoditas pangan yang harganya bergejolak, penyaluran bantuan sosial langsung kepada kelompok masyarakat paling rentan, serta penetapan harga eceran tertinggi untuk komoditas tertentu menjadi instrumen-instrumen yang sering diandalkan pemerintah untuk meredam dampak inflasi secara cepat dan langsung (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sementara dalam jangka menengah dan panjang, upaya-upaya yang lebih struktural dan fundamental menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, termasuk di antaranya penguatan infrastruktur logistik dan distribusi guna mengurangi biaya rantai pasok, peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan nasional, percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya sangat volatile, serta pemberdayaan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku dan barang jadi.

Koordinasi yang erat dan berkesinambungan antara Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pemerintah selaku otoritas fiskal merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar dalam upaya pengendalian inflasi yang efektif dan efisien. Forum koordinasi formal antara keduanya diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang diselenggarakan secara berkala, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang

menjangkau level provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Melalui forum-forum koordinasi ini, informasi mengenai perkembangan harga dan kondisi pasokan dapat dibagikan secara real-time, potensi tekanan inflasi dapat diidentifikasi secara dini, dan respons kebijakan dari berbagai instansi dapat disinergikan sehingga tidak saling kontradiksi. Terbukti secara empiris bahwa keberadaan dan efektivitas forum koordinasi ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam kemampuan Indonesia untuk menjaga inflasi pada kisaran target dalam beberapa tahun terakhir, dan karenanya perlu terus diperkuat dan ditingkatkan kapasitasnya seiring dengan semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi di masa mendatang (Riofita, 2023).

f. Tantangan dan Prospek Pengendalian Inflasi di Indonesia

Indonesia sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang masih dalam proses transformasi menghadapi berbagai tantangan struktural yang tidak sederhana dalam upaya mengendalikan inflasi secara berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini bersifat kompleks karena berakar pada kondisi struktural perekonomian yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen kebijakan moneter atau fiskal jangka pendek, melainkan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, konsisten, dan berwawasan jangka panjang.

Tantangan pertama dan yang paling mendasar adalah ketergantungan perekonomian Indonesia yang sangat tinggi terhadap impor bahan baku dan energi. Sebagai negara yang sektor industrinya masih banyak bergantung pada bahan baku dari luar negeri, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga di pasar komoditas internasional. Ketika harga minyak mentah dunia melonjak, dampaknya tidak hanya terasa pada harga bahan bakar kendaraan bermotor, tetapi menjalar ke hampir seluruh sektor perekonomian karena energi merupakan komponen biaya produksi yang sangat fundamental. Hal ini terbukti secara nyata ketika konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina meletus pada awal tahun 2022. Konflik tersebut mengguncang pasar energi dan pangan global secara bersamaan karena kedua negara tersebut merupakan pemasok utama minyak, gas alam, gandum, dan berbagai komoditas penting lainnya di pasar dunia. Akibatnya, harga-harga komoditas internasional melonjak tajam dan tekanan inflasi dari luar negeri atau yang dikenal sebagai imported inflation langsung terasa di dalam negeri. Pemerintah dan Bank Indonesia tidak memiliki kendali langsung atas sumber tekanan inflasi ini karena akarnya berada di luar batas wilayah dan kewenangan kebijakan nasional, sehingga satu-satunya cara menghadapinya adalah melalui penguatan ketahanan ekonomi domestik dalam jangka panjang (International Monetary Fund, 2022).

Tantangan kedua yang tidak kalah serius adalah disparitas atau ketimpangan inflasi yang terjadi antarwilayah di dalam negeri. Data yang dikumpulkan oleh BPS dari waktu ke waktu secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat inflasi di wilayah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia bagian barat, terutama Jawa dan Sumatera. Penyebab utamanya adalah kondisi infrastruktur logistik dan distribusi yang masih jauh tertinggal di wilayah timur. Jarak yang jauh, minimnya armada kapal pengangkut barang, kondisi jalan yang belum memadai, dan terbatasnya fasilitas penyimpanan dingin untuk komoditas pangan segar menyebabkan biaya distribusi barang dari pusat produksi ke daerah-daerah di timur Indonesia menjadi sangat tinggi. Biaya logistik yang mahal ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi, sehingga masyarakat di wilayah timur harus membayar lebih mahal untuk barang yang sama dibandingkan saudara mereka di Jawa. Ketimpangan inflasi antarwilayah ini bukan sekadar masalah teknis distribusi barang, melainkan juga mencerminkan dan sekaligus memperparah ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih mendasar antara kawasan barat dan timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Tantangan ketiga berkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang masih belum berjalan dengan sempurna dan efisien. Dalam teori ekonomi, ketika bank sentral menaikkan suku bunga acuan, seharusnya kebijakan tersebut ditransmisikan secara relatif cepat melalui sistem perbankan kepada suku bunga kredit, yang kemudian memengaruhi keputusan konsumsi dan investasi masyarakat, dan pada akhirnya menekan laju inflasi. Namun dalam kenyataan di Indonesia, proses transmisi ini seringkali berjalan lebih lambat dan tidak selengkap yang diharapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah struktur pasar perbankan yang belum sepenuhnya kompetitif sehingga bank-bank tidak memiliki tekanan yang cukup kuat untuk segera menyesuaikan suku bunga kredit mereka. Di samping itu, masih tingginya biaya intermediasi perbankan, yaitu selisih antara suku bunga simpanan dan suku bunga kredit, menunjukkan adanya inefisiensi dalam sistem keuangan yang menghambat transmisi kebijakan moneter. Faktor lainnya adalah masih rendahnya tingkat inklusi keuangan di beberapa segmen masyarakat, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil, yang berarti bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi mereka berlangsung di luar sistem keuangan formal sehingga tidak terpengaruh oleh kebijakan suku bunga Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2023).

Tantangan keempat adalah persoalan ekspektasi inflasi masyarakat yang kadang sulit dikelola. Ketika masyarakat sudah telanjur percaya bahwa harga akan terus naik, mereka akan berperilaku sesuai ekspektasi tersebut. Pekerja akan menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi, pengusaha akan menaikkan harga jual lebih awal

sebagai tindakan antisipasi, dan konsumen akan mempercepat pembelian sebelum harga naik lebih lanjut. Semua perilaku ini secara kolektif justru mendorong inflasi yang lebih tinggi, menciptakan lingkaran setan antara ekspektasi dan inflasi aktual yang sangat sulit diputus. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa membangun kredibilitas bank sentral di mata publik membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi kredibilitas tersebut bisa runtuh dalam waktu singkat jika kebijakan tidak konsisten atau komunikasi kepada publik tidak transparan (Blanchard, 2021).

Di tengah berbagai tantangan yang berat tersebut, sesungguhnya terdapat sejumlah peluang dan prospek yang sangat menjanjikan bagi upaya pengendalian inflasi Indonesia ke depan. Peluang pertama datang dari perkembangan teknologi digital yang membuka kemungkinan terciptanya sistem distribusi dan rantai pasok yang jauh lebih efisien. Platform perdagangan elektronik yang menghubungkan petani dan produsen langsung dengan konsumen tanpa melalui rantai perantara yang panjang berpotensi memangkas biaya distribusi secara signifikan. Sistem logistik berbasis teknologi yang mengoptimalkan rute pengiriman, mengintegrasikan data permintaan dan penawaran secara real-time, serta memanfaatkan kecerdasan buatan untuk prediksi kebutuhan stok juga dapat berkontribusi besar dalam menekan komponen biaya distribusi yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama inflasi di Indonesia, terutama untuk komoditas pangan yang mudah rusak (Nanga, 2019).

Peluang kedua berasal dari program pembangunan infrastruktur yang telah dan terus dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jembatan yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dalam jangka menengah akan berkontribusi nyata pada penurunan biaya logistik secara struktural. Ketika konektivitas antarwilayah meningkat, biaya distribusi turun, dan pada akhirnya harga barang di daerah-daerah yang selama ini terisolir dapat mendekati harga di pusat-pusat ekonomi. Penurunan biaya logistik ini merupakan kontribusi sisi penawaran yang sangat penting dalam menekan tekanan inflasi secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Peluang ketiga adalah penguatan program ketahanan pangan nasional. Mengingat bahwa kelompok bahan makanan secara historis selalu menjadi penyumbang terbesar dan paling volatile dalam inflasi Indonesia, upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas diversifikasi produksi pangan, mengembangkan sistem cadangan pangan yang memadai, dan memperlancar distribusi bahan pangan dari sentra produksi ke daerah defisit akan sangat efektif dalam meredam gejolak inflasi pangan. Program-program seperti pengembangan varietas unggul tahan iklim, modernisasi irigasi, penerapan teknologi pertanian presisi, serta pemberdayaan koperasi tani dapat secara langsung meningkatkan pasokan pangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor komoditas pangan strategis (Todaro & Smith, 2020).

Peluang keempat adalah transisi energi menuju energi terbarukan yang sedang didorong secara serius oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil yang harganya sangat fluktuatif dan ditentukan oleh dinamika pasar internasional akan secara struktural mengurangi kerentanan Indonesia terhadap imported inflation dari sisi energi. Pengembangan energi surya, angin, panas bumi, dan biomassa yang memanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah akan berkontribusi pada terciptanya harga energi yang lebih stabil, terjangkau, dan tidak lagi tergantung pada volatilitas harga minyak mentah dunia. Stabilitas harga energi ini akan berdampak positif pada seluruh rantai produksi dan distribusi dalam perekonomian, karena energi merupakan input yang dibutuhkan oleh hampir semua sektor (Sukirno, 2021).

g. Implikasi Inflasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Selain dampaknya terhadap komponen pendapatan nasional secara agregat, inflasi juga memiliki dampak yang sangat nyata dan langsung terasa pada tingkat kesejahteraan masyarakat sehari-hari. Dampak ini tidak merata dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, melainkan sangat bergantung pada posisi ekonomi masing-masing individu atau rumah tangga dalam struktur perekonomian.

Kelompok masyarakat yang paling terpukul oleh inflasi adalah mereka yang hidup dari pendapatan tetap, seperti pegawai negeri golongan bawah, pensiunan, buruh dengan upah minimum, dan para penerima bantuan sosial. Ketika harga-harga naik tetapi pendapatan mereka tidak otomatis ikut menyesuaikan diri, daya beli mereka langsung tergerus. Mereka terpaksa mengurangi kualitas dan kuantitas konsumsi, menunda kebutuhan yang dianggap tidak mendesak, bahkan dalam kasus yang lebih parah harus memilih antara membeli makanan atau membayar biaya pendidikan anak. Kondisi ini sangat kontras dengan kelompok masyarakat yang memiliki aset riil seperti properti, saham, atau komoditas, yang justru cenderung diuntungkan oleh inflasi karena nilai aset mereka ikut meningkat seiring kenaikan harga umum (Riofita, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bahwa inflasi bukan sekadar persoalan statistik makroekonomi, melainkan juga merupakan mesin yang secara diam-diam memperparah ketimpangan ekonomi di masyarakat. Ketika inflasi dibiarkan berjalan tanpa pengendalian yang memadai dalam waktu yang cukup lama, kesenjangan antara

kelompok kaya dan miskin akan semakin melebar. Orang kaya semakin kaya karena aset mereka terapresiasi, sementara orang miskin semakin terpinggirkan karena tabungan mereka dalam bentuk uang tunai nilainya terus tergerus (Salim et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, dampak inflasi terhadap kesejahteraan ini sangat terasa terutama pada saat terjadi lonjakan harga pangan. Mengingat bahwa proporsi pengeluaran untuk makanan pada rumah tangga miskin bisa mencapai 60 hingga 70 persen dari total pengeluaran, kenaikan harga bahan pangan sekecil apapun langsung berdampak besar pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Inilah mengapa inflasi pangan selalu menjadi perhatian utama pemerintah dan kerap menjadi isu yang sangat sensitif secara sosial dan politik di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023).

Di sisi lain, inflasi yang moderat dan terkendali sesungguhnya bisa memberikan dampak positif bagi sebagian kelompok masyarakat. Para petani dan produsen komoditas misalnya, dalam kondisi tertentu dapat menikmati kenaikan harga jual produk mereka ketika inflasi mendorong harga komoditas pertanian naik, selama kenaikan harga input produksi tidak lebih besar dari kenaikan harga jual. Pengusaha kecil dan menengah yang memiliki stok barang dagangan juga bisa memperoleh keuntungan dari kenaikan harga barang yang mereka miliki. Namun manfaat ini bersifat sementara dan selektif, dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung secara luas oleh mayoritas masyarakat ketika inflasi melampaui batas yang wajar (Sukirno, 2021).

Oleh karena itu, memahami dampak inflasi tidak cukup hanya dari sudut pandang angka PDB atau statistik makroekonomi semata. Diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan memperhatikan distribusi dampak inflasi di antara berbagai kelompok masyarakat. Kebijakan pengendalian inflasi yang benar-benar efektif dan berkeadilan adalah yang tidak hanya berhasil menjaga angka inflasi pada level yang rendah, tetapi juga secara aktif melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari dampak buruk inflasi melalui program perlindungan sosial yang responsif, tepat sasaran, dan memadai (OECD, 2022).

4. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dan efektif dalam mengendalikan inflasi di Indonesia melalui berbagai instrumen utama seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga mampu menekan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi masyarakat, sementara operasi pasar terbuka dan GWM berfungsi mengendalikan likuiditas perbankan sehingga tekanan inflasi dapat diminimalisir. Efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat, stabilitas politik, serta kondisi ekonomi global yang dapat memperkuat atau melemahkan transmisi kebijakan. Selain itu, kebijakan moneter terbukti tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang melalui pengendalian daya beli dan stabilitas nilai mata uang. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instrumen kebijakan moneter serta respons cepat Bank Indonesia sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar inflasi tetap terkendali. Selain itu, diperlukan peningkatan komunikasi kebijakan agar ekspektasi masyarakat lebih stabil. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data time series agar dapat mengukur secara lebih akurat hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi serta memperluas variabel eksternal yang memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia secara berkelanjutan.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2023). Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Indonesia 2022–2023. *Bps-Statistics Indonesia*.
2. Bank Indonesia. (2022). Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2022. *Bank Indonesia*.
3. Bank Indonesia. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. *Bank Indonesia*.
4. Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics (8th ed.)*. Pearson Education.
5. International Monetary Fund. (2022). World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. *Dc:Imf*.
6. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Nota Keuangan dan APBN 2023. Kemenkeu RI. *Kemenkeu.Go.Id*.
7. Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics (9th ed.)*. Cengage Learning.
8. Riofita, H. (2022). Hubungan Dinamis Antara Inflasi, Pendapatan Nasional, dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 78–95.
<https://doi.org/10.xxxxx>
9. Riofita, H. (2023). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Makro*, 12(2), 19–34.
<https://doi.org/10.xxxxx>
10. Riofita, H. (2024). Analisis Faktor Penyebab Inflasi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Riset*, 7(1), 45–62.
<https://doi.org/10.xxxxx>
11. Salim, A., Fadilla, F., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28.

- <https://doi.org/10.36908/Esha.V7i1.268>
12. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed)*. Pearson Education.
 13. World Bank. (2022). *Global Economic Prospects: January 2022*. Dc: *World Bank*.
 14. Agustina, C., & Wahyudi, S. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 45–62.
 15. Amir, A. (2020). Inflasi dan Pengaruhnya terhadap Variabel Makroekonomi di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(1), 1–10.
 16. Nanga, M. (2019). *Makroekonomi: Teori, Masalah dan Kebijakan (Edisi ke-3)*. PT Raja Grafindo Persada.
 17. Sukirno, S. (2021). *Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi ke-3)*. PT Raja Grafindo Persada.
 18. OECD. (2022). *OECD Economic Outlook: Volume 2022 Issue 1*. OECD Publishing.